

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO.2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DI KAWASAN TEMBALANG

Oleh:

Alvera Hazmi Wikaningtyas, DR. Kismartini, M.Si., DR. Hartuti Purnaweni, MPA.

JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jalan Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang, Semarang Kotak Pos 1269
Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405
Laman: <http://fisip.undip.ac.id> email: fisip@undip.ac.id

Abstrak

Kawasan Tembalang, yang sekarang ini menjadi sangat ramai karena keberadaan kampus UNDIP, memberikan dampak negatif pada kelancaran arus lalu lintas, khususnya parkir di tepi jalan umum yang memakan sebagian luas jalan raya. Namun sayangnya, kondisi ini tidak diimbangi dengan pendapatan dari retribusi parkir di tepi jalan umum. Dalam melakukan penelitian ini digunakan metode penelitian kualitatif. Permasalahan retribusi parkir di tepi jalan umum ini juga dijabarkan secara deskriptif dengan pendekatan fenomenologis. Target retribusi parkir di tepi jalan umum dalam Pendapatan Asli Daerah yang telah ditetapkan oleh pemerintah kota Semarang untuk kawasan Tembalang tidak pernah terpenuhi. Bidang Perparkiran Dishubkominfo Kota Semarang telah melakukan beberapa upaya untuk mengurangi kebocoran pendapatan dari retribusi parkir di tepi jalan umum tersebut. Banyaknya titik parkir liar turut mempengaruhi pencapaian target pendapatan. Melalui Perda No.2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, pemerintah kota Semarang menerapkan tarif retribusi parkir yang baru untuk memenuhi target pendapatan. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa Bidang Perparkiran telah melakukan patroli rutin untuk mengawasi implementasi penarikan retribusi parkir di tepi jalan umum. Walau demikian, kasus parkir liar ini masih sering ditemui di lapangan. Dalam hal kelengkapan fasilitas, di kawasan Tembalang ini masih belum dijumpai adanya rambu-rambu parkir, papan tarif retribusi maupun fasilitas bagi petugas parkir.. Untuk itu, disarankan agar tercipta keterlibatan semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat.

Kata Kunci: Implementasi kebijakan, Retribusi Parkir, PAD, Faktor pendorong dan penghambat

Abstract

Nowadays, Tembalang Region that have many universities there become very crowded, gives impact to the flow of traffic fluency, especially for public roadside parking that dispatch some of highroad area. Unfortunately, this condition isn't complemeted with the revenue from public roadside levy. This reasearch is used qualitative methode and the problems on public roadside parking levy are explained descriptively with phenomenology approach. The target from Local Own Revenue (PAD) that is appointed by Semarang government never fulfilled. Parking Division of Dishubkominfo Semarang had did some efforts to decrease the revenue leakage of roadside parking levy. The large number of illegal parking spot gives much effects for the revenue target achievement. Through this Local Regulation No.2/2012 about Public Service Levies, Semarang government applies the new tariff of parking levy to fulfilled this revenue target. In this research, it can be known that Parking Division had made routine patrol to control the implementation of public roadside parking levy withdrawal. This control is conducted to againts either the illegal parking spot or illegal parking attendants. However, this illegal parking still found. In terms of completeness facilities cannot found in Tembalang Region. Meanwhile, the implementation of public roadside levy policy should be complement with equal facilities either for implementor, such parking sign facilities.

Key Words: Policy Implementation, Parking Levy at Tembalang Region, PAD, Push and Pull Factors

PENDAHULUAN

Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah menitikberatkan pada daerah kabupaten/kota yang memberikan kewenangan luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah. Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah memiliki salah satu hak yaitu memungut pajak dan retribusi daerah sebagai sumber pemasukan bagi Pendapatan Asli Daerah.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Semarang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat salah satunya dengan menetapkan Peraturan

Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum. Dalam retribusi jasa umum di dalamnya terdapat retribusi parkir di tepi jalan umum. Potensi pendapatan pada retribusi parkir di tepi jalan umum yang dimiliki Kota Semarang cukup besar. Tujuan diberlakukannya Perda No.2 Tahun 2012 ini adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui optimalisasi pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum. Perda ini mengatur perubahan tarif parkir kendaraan bermotor sehingga diharapkan target retribusi dapat terpenuhi.

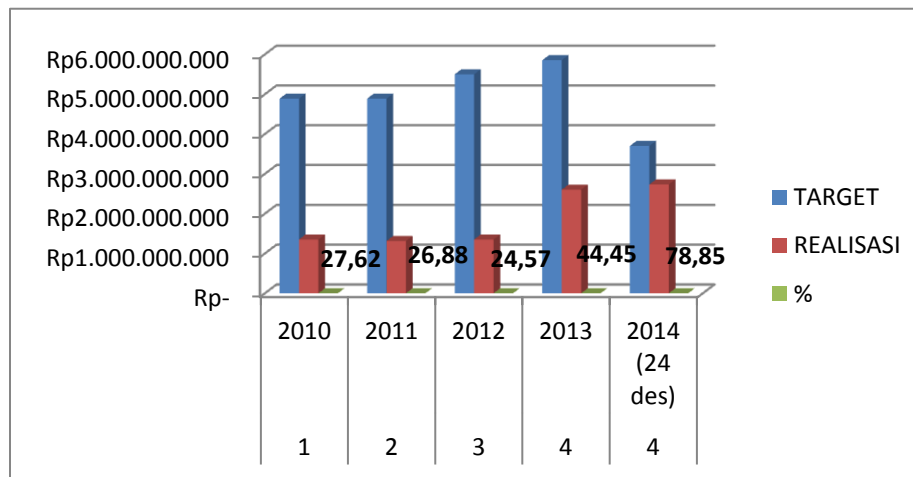
Penelitian ini mengambil fokus lokasi di kawasan Tembalang yang beberapa tahun terakhir ini memiliki perkembangan yang cukup pesat. Melalui keberadaan beberapa universitas besar ternama seperti Undip, Polines, Poltekkes, serta Unpand kawasan Tembalang menjadi tempat tujuan pendatang dari berbagai daerah di sekitarnya. Keberadaan pendatang menyebabkan kepadatan penduduk di Kawasan Tembalang bertambah sehingga memicu pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat. Seiring dengan perkembangan yang terjadi di Kawasan Tembalang, dimana terdapat pertumbuhan berbagai tempat usaha seperti pertokoan, rumah makan maupun kios *photo copy*, menimbulkan dampak seperti kemacetan lalu lintas. Kemacetan ini terjadi karena tempat usaha ini tidak memiliki areal yang cukup untuk menampung parkir.

Selain itu dalam implementasi pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum di Kawasan Tembalang masih ditemukan praktik pemungutan retribusi yang tidak sesuai dengan ketentuan dan prosedur baik yang terdapat di dalam perda maupun petunjuk pelaksanaan. Pelanggaran yang ditemukan seperti tidak tersedianya rambu-rambu parkir, papan tarif parkir, maupun satuan ruang parkir di setiap titik

parkir di Kawasan Tembalang. Pelanggaran lain yang sering ditemui yaitu pelanggaran yang dilakukan oleh juru parkir yang tidak memberikan karcis parkir kepada pelanggan di Kawasan Tembalang sehingga target pendapatan parkir tidak tercapai.

Target retribusi parkir di tepi jalan umum Kota Semarang tahun 2014 yaitu 3,6 M dengan total jumlah titik parkir 1.128 buah. Data yang diperoleh dari Bidang Perparkiran Dishubkominfo menyebutkan bahwa Kawasan Tembalang memiliki 39 titik parkir resmi dengan rata-rata setoran per harinya yaitu Rp10.000,00. Berdasarkan jumlah setoran tersebut, dapat diketahui pendapatan retribusi parkir di tepi jalan umum di Kawasan Tembalang mencapai Rp117.000.000,00 per tahun. Berdasarkan target retribusi Kota Semarang, Kawasan Tembalang seharusnya pendapatan retribusi yang disetor sebesar Rp127.925.500,00. Jadi, ketercapaian target retribusi di Kawasan Tembalang masih sebesar 91,45%. Berikut gambaran capaian target retribusi parkir di tepi jalan umum Kota Semarang.

Grafik Realisasi Pendapatan Asli Daerah Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Semarang



Sumber: Laporan Triwulan IV Bidang Perparkiran Dishubkominfo Kota Semarang, 2014

KERANGKA TEORI

J. Anderson memberikan definisi kebijakan publik sebagai arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor untuk mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan.¹ Kebijakan yang telah dibuat pemerintah bagaimanapun harus dilaksanakan untuk mencapai target yang telah direncanakan. Untuk itu, suatu kebijakan harus melewati suatu tahapan implementasi kebijakan publik setelah diformulasikan oleh pemerintah. Van Meter dan Van Horn mengatakan implementasi sebagai tindakan yang dilakukan pemerintah maupun swasta secara individu maupun kelompok untuk mencapai tujuan, sebagaimana dirumuskan dalam kebijakan.²

Implementasi kebijakan tidak dapat terlepas dari prinsip dasar bagi implementasi kebijakan yang efektif. Prinsip-prinsip tersebut meliputi ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksana, ketepatan target, dan ketepatan lingkungan.³ Implementasi perda tentang retribusi parkir di tepi jalan umum ini juga dipengaruhi oleh prinsip implementasi tersebut.

Disamping itu, efektivitas sebuah kebijakan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mendorong maupun menghambat implementasi kebijakan tersebut. Menurut George C. Edwards III terdapat empat prakondisi yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan.⁴ Faktor pertama adalah komunikasi yang ditentukan oleh proses transmisi, kejelasan, dan konsistensi implementor.

¹ Budi Winarno, 2012:21

² dalam Budi Winarno, 2012:149

³ Riant Nugroho, 2012:650

⁴ dalam Budi Winarno, 2012: 178-206

Kedua, sumberdaya yang mendukung proses implementasi seperti staff, anggaran, fasilitas, dan sistem informasi. Namun, ada kalanya ketersediaan sumberdaya yang tidak memadai menjadi faktor penghambat dalam implementasi kebijakan tersebut.

Ketiga, disposisi yang dimiliki oleh implementor juga mempengaruhi keberhasilan kebijakan. Wewenang yang cukup dan tanggung jawab implementor dapat menjadi faktor yang mendorong implementasi kebijakan. Keempat, adanya struktur birokrasi dapat memperjelas prosedur pelaksanaan sebuah kebijakan dan pembagian kerja dalam melaksanakan kebijakan tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Fenomena-fenomena yang ditemui di lapangan akan dijelaskan lebih mendalam untuk memahami implementasi kebijakan retribusi parkir di tepi jalan umum berdasarkan Perda No.12 Tahun 2012. Dalam penelitian ini informan dipilih dengan menggunakan teknik purposive dimana informan diambil dari sejumlah kecil orang dengan karakteristik khusus, yang disebut dengan *key person*. Teknik lain yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik *snowball sampling*.

Key person dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Perparkiran Dishubkominfo Kota Semarang. Setelah itu, beliau akan mengarahkan untuk melakukan wawancara kepada Kepala Seksi Parkir Umum dan Khusus serta Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian. Selain itu peneliti juga melakukan wawancara kepada juru parkir dan masyarakat di kawasan Tembalang.

Pengumpulan data dalam penelitian ini juga dilakukan melalui observasi di lapangan dan studi pustaka. Observasi atau pengamatan dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas bagaimana kondisi sesungguhnya. Sedangkan kajian studi pustaka dilakukan dengan tujuan untuk menunjang data hasil penelitian. Analisis dilakukan setelah diperoleh data dari hasil wawancara dan observasi secara induktif, yaitu membuat kesimpulan berdasarkan informasi dari narasumber.

PEMBAHASAN

Kebijakan retribusi parkir di tepi jalan umum ini diimplementasikan melalui Peraturan Walikota Semarang No.20 Tahun 2013. Dalam implementasinya terdapat beberapa fakta yang ditemukan.

1. Implementasi Retribusi

a. Ketepatan Kebijakan

Tujuan yang hendak dicapai melalui regulasi ini yaitu untuk mengatasi permasalahan parkir di tepi jalan umum yang ada di Kota Semarang, khususnya di kawasan Tembalang. Pemanfaatan bahu jalan ini berimbas pada kelancaran lalu lintas karena luas jalan yang dilalui oleh kendaraan menjadi berkurang, akibatnya timbul kemacetan lalu lintas. Permasalahan selanjutnya yaitu tidak semua titik parkir teridentifikasi oleh Dishub sehingga menimbulkan kebocoran penerimaan pendapatan.

Dari sisi kejelasan isi, menunjukkan bahwa Bidang Perparkiran Dishubkominfo Kota Semarang dalam mengimplementasikan kebijakan ini sudah tepat. Hal tersebut dapat dilihat dari upaya yang dilakukan oleh petugas dalam menciptakan ketertiban parkir di tepi jalan umum sehingga pendapatan dari retribusi parkir mengalami kenaikan dari 1,3 juta menjadi 2,6 juta per bulannya.

b. Ketepatan Pelaksana

Ketepatan implementor ini ditentukan oleh kompetensi dan kapabilitas implementor dalam

mengimplementasikan kebijakan tidak hanya harus selaras dengan tujuan awal namun juga harus disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Agen pelaksana dalam implementasi retribusi parkir di tepi jalan umum meliputi pegawai Dishub dan juru parkir. Agen pelaksana dari Dishub terdiri dari bendahara dan petugas patroli.

Implementasi retribusi parkir di tepi jalan umum ini dikelola dan dilaksanakan sendiri oleh Dishub Kota Semarang. Juru parkir tepi jalan umum ini harus mendaftarkan dirinya ke Dishub sebagai anggota juru parkir yang sah. Namun, pada kenyataannya ketika patroli juga tidak jarang ditemukan juru-juru parkir liar.

Terkait pemahaman implementor terhadap isi kebijakan, pemahaman dari pihak Dishubkominfo Kota Semarang dapat dikatakan sudah baik. Hal ini dibuktikan dengan kesesuaian tugas yang dilakukan dengan tupoksi. Tapi, untuk pelaksanaan di lapangan masih ditemukan beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh juru parkir.

c. Ketepatan Target

Ketepatan target dilihat apakah target yang diintervensi sesuai, apakah terjadi tumpang tindih dengan kebijakan lain, atau apakah kebijakan tersebut ber-tentangan dengan intervensi kebijakan lain atau tidak.⁵ Dalam implementasi kebijakan retribusi parkir di tepi jalan umum yang mejadi target adalah peningkatan penerimaan pendapatan daerah.

Dari data yang diperoleh, diketahui bahwa pendapatan retribusi parkir di tepi jalan umum ini tidak pernah mencapai target. Hal ini disebabkan karena ditemukan banyak kebocoran dalam implementasinya. Namun, semenjak kebijakan tarif baru ini diterapkan pendapatan retribusi parkir di tepi jalan umum mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dilihat dari respons masyarakat dalam menanggapi kebijakan ini, dapat diketahui bahwa masyarakat ada dalam kondisi siap untuk diintervensi. Berkaitan dengan hal pemberian karcis parkir masyarakat mengaku bahwa tidak pernah mendapatkan karcis. Dilain pihak, masyarakat juga tidak pernah memperpanjang masalah

karena mereka tidak mau berdebat dengan juru parkir.

d. Ketepatan Lingkungan

Ketepatan lingkungan dinilai dari interaksi diantara lembaga perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan dengan lembaga lain yang terkait. Berdasarkan hasil penelitian, implementasi kebijakan retribusi parkir di tepi jalan umum ini dilakukan sendiri oleh Dishubkominfo Kota Semarang. Secara umum, lingkungan internal dalam implementasi retribusi parkir di tepi jalan umum saling mendukung satu sama lain.

Selain interaksi antarseksi dalam implementasi kebijakan retribusi parkir di tepi jalan umum, Dishubkominfo juga bekerja sama dengan instansi terkait lainnya seperti pihak Kepolisian, Satpol PP dan Polisi Militer Angkatan Darat. Kerjasama ini dilakukan saat melakukan operasi gabungan dalam rangka menertibkan parkir-parkir liar yang marak terjadi di lapangan. Selain itu juga dilakukan penertiban kepada kendaraan yang parkir sembarangan dengan tujuan untuk memberi efek jera kepada masyarakat.

⁵ Riant Nugroho, 2012:651

2. Faktor yang mendukung dan menghambat implementasi

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa faktor yang mendorong dan faktor yang menghambat implementasi Perda No.2 Tahun 2012 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum di Kawasan Tembalang.

a. Faktor yang mendukung

- Disposisi

Disposisi dapat juga diartikan sebagai sikap dari implementor dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut. Dalam pelaksanaannya menunjukkan bahwa kewenangan dari Bidang Perparkiran Dishubkominfo Kota Semarang sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga birokrasi yang bertugas menjalankan retribusi parkir ini. Dalam mengatasi permasalahan tidak tercapainya target pendapatan retribusi parkir, diperlukan komitmen tidak hanya dari petugas Dishub namun juga dari juru parkir di lapangan. Petugas harus berkomitmen untuk menindak segala pelanggaran yang ditemui.

- Struktur Birokrasi

Dalam implementasi Perda No.2 Tahun 2012 tentang Retribusi Parkir

di Tepi Jalan Umum di Kawasan Tembalang, petugas melakukan pemungutan retribusi berdasarkan Peraturan Walikota Kota Semarang No. 20 Tahun 2013. Perwal ini berupa petunjuk pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum. Kejelasan prosedur pemungutan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dijelaskan kembali melalui kegiatan sosialisasi yang dilakukan.

Struktur birokrasi yang dimiliki oleh Bidang Perparkiran Dishubkominfo Kota Semarang bersifat hirarki, dimana perintah berasal dari Kepala Bidang dan didesentralisasikan kepada setiap seksi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.

b. Faktor yang menghambat

- Komunikasi

Komponen dalam faktor komunikasi terdiri dari tiga aspek, yaitu transmisi, kejelasan, dan konsistensi penyampaian isi kebijakan. Pertama, transmisi dalam faktor komunikasi ini merupakan proses penyampaian informasi. Informasi yang disampaikan dalam hal ini adalah isi dari kebijakan retribusi parkir di tepi

jalan yang meliputi mekanisme penyetoran retribusi dan perubahan tarif retribusi parkir. Penyampaian informasi dilakukan dengan melakukan sosialisasi secara langsung kepada juru parkir sehingga mereka mengetahui perubahan tarif parkir serta prosedur pemungutan retribusi dan prosedur penyetoran retribusi. Namun, temuan di lapangan menunjukkan bahwa juru parkir terlihat memungut retribusi melebihi ketentuan tarif.

Kedua, kejelasan informasi yang diterima oleh juru parkir menjadi faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan tersebut. Juru parkir telah memahami dengan jelas isi dari kebijakan tersebut. Namun, pada kenyataannya masih sering ditemui pelanggaran-pelanggaran yang kerap dilakukan. Masyarakat telah mengetahui bahwa telah terjadi kenaikan tarif parkir. Sebagai pengguna jasa parkir, masyarakat pun mendukung kebijakan ini. Namun, hal yang disayangkan dari keterlibatan masyarakat ini adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam masalah ketertiban karcis.

Ketiga, konsistensi petugas dalam mengimplementasi kebijakan ini, Bidang Perparkiran Dishubkominfo melakukan sosialisasi dengan baik kepada juru parkir. Penyampaian ini dilakukan melalui media massa maupun secara langsung. Sosialisasi yang dilakukan juga mencakup sosialisasi tentang sanksi yang akan diberikan apabila terjadi pelanggaran. Sanksi yang diberikan kepada juru parkir yang melanggar aturan berupa denda Tipiring sebesar Rp50.000,00. Selain diberi sanksi, apabila ditemukan juru parkir liar mereka akan diarahkan untuk mendaftarkan diri ke Dishub.

- Sumber Daya

Sumber daya merupakan faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan. Ketersediaan staff, anggaran, fasilitas, dan sistem informasi yang kurang memadai dapat menghambat implementasi kebijakan sehingga tujuan kebijakan tidak dapat tercapai optimal.

Pertama, kemampuan staff Dishubkominfo dalam implementasi kebijakan ini sudah memadai. Tetapi disisi lain jumlah petugas masih kurang. Keterbatasan personil dalam

melakukan patroli mengakibatkan pengawasan dan pengendalian kurang optimal. Kedua, ketersediaan anggaran dalam implementasi parkir di tepi jalan umum juga mempengaruhi kinerja pegawai. Dengan setumpuk program dan kegiatan yang harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan parkir, Bidang Perparkiran Dishub dituntut untuk melaksanakan kegiatan tersebut berdasarkan pada skala prioritas.

Ketiga, ketersediaan fasilitas dalam implementasi parkir di tepi jalan umum ini mencakup sarana-prasarana. Berdasarkan hasil pengamatan, ditemukan fakta bahwa tidak semua titik parkir yang ada di Kawasan Tembalang dilengkapi dengan rambu-rambu parkir. Dari segi juru parkir, fasilitas yang disediakan oleh Dishub juga belum memadai. Hal ini ditunjukkan dari keterangan juru parkir resmi yang menyatakan bahwa kelengkapan fasilitas untuk menyelenggarakan parkir ini tidak diakomodasi oleh Dishub. Keempat, terkait dengan sistem informasi yang dimiliki oleh Bidang Perparkiran Dishubkominfo

dalam mengatasi masalah retribusi parkir di tepi jalan umum, diketahui bahwa belum tersedia sistem informasi terpadu yang memadai.

PENUTUP

1. Kesimpulan

a. Implementasi Kebijakan

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa intensitas tujuan dari kebijakan retribusi parkir di tepi jalan umum ini belum mencapai hasil yang optimal. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mengatasi permasalahan parkir yang ada di Kawasan Tembalang seperti penataan parkir dan parkir liar yang mempengaruhi pencapaian target retribusi Kota Semarang. Dalam kaitannya dengan pencapaian retribusi parkir retribusi tepi jalan umum menunjukkan bahwa petugas sudah memahami isi kebijakan dengan baik sehingga terjadi kenaikan pendapatan setiap tahunnya. Namun sayangnya, kenaikan tren pendapatan ini tidak berbanding lurus dengan kenaikan target pendapatan.

Koordinasi dan komunikasi antarseksi berjalan dengan baik, begitu juga interaksi dari petugas dishub dengan juru parkir maupun petugas

pemungut. Lingkungan eksternal melibatkan adanya partisipasi dan kerjasama antara Bidang Perparkiran Dishubkominfo dengan instansi terkait lainnya serta masyarakat. Instansi lain yang terlibat yaitu Kepolisian, Satpol PP dan PM AD. Koordinasi ini berjalan dengan baik dan tidak ada kendala yang dihadapi.

b. Faktor yang mendorong dan menghambat

Secara umum faktor yang mendorong implementasi retribusi ini antara lain disposisi dan struktur birokrasi. Porsi kewenangan dan tanggung jawab yang dimiliki oleh Dishubkominfo selaku implementor sudah sesuai dengan tupoksi. Disamping itu, struktur birokrasi yang jelas sudah dimiliki oleh Bidang Perparkiran Dishubkominfo Kota Semarang setiap seksi mengimplementasikan kebijakan ini sesuai dengan job description masing-masing.

Namun, terdapat beberapa faktor lain yang menghambat implementasi kebijakan. Faktor tersebut adalah komunikasi dan ketersediaan sumber daya. Komunikasi yang tidak sempurna menyebabkan juru parkir tidak memiliki kesadaran untuk

memberikan karcis dan memungut retribusi diatas ketentuan tarif yang ada. Ketersediaan sumber daya staff, anggaran, fasilitas dan sistem informasi yang dimiliki oleh Dishubkominfo belum memadai. Rambu-rambu parkir yang minim menyebabkan masyarakat tidak mengetahui bahwa parkir tersebut mengganggu kelancaran lalu lintas di Kawasan Tembalang.

2. Saran

Untuk mengatasi permasalahan parkir di tepi jalan umum ini, ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah sebagai penyelenggara retribusi parkir di tepi jalan umum. Beberapa hal yang perlu dilakukan antara lain:

- a. Intensifikasi pendapatan retribusi dengan melakukan pengawasan ketat terhadap penyeteroran hasil pemungutan retribusi serta ekstensifikasi melalui pendataan ulang titik parkir dan juru parkir sehingga target pendapatan retribusi tercapai.
 - b. Penerapan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran di lapangan.
 - c. Penyediaan kelengkapan fasilitas bagi keperluan pengawasan maupun fasilitas rambu parkir di Kawasan Tembalang.
-

DAFTAR PUSTAKA

- Badjuri, Abdulkahar & Yuwono, Teguh, 2002. Kebijakan Publik Konsep dan Strategi. Semarang: Jurusan Ilmu Pemerintahan FIFIP UNDIP
- Keban, Yeremias T. 2008. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori, dan Isu. Yogyakarta: Gaya Media.
- Moleong, L.J. 2004. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nasir, Moh. 2009. Metode Penelitian, Cetakan Keempat. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nugroho, Riant. 2012. Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan. Jakarta: PT Gramedia.
- Safawi, Indra, Sujianto dan Zaili Rusli. 2012. Implementasi Kebijakan Retribusi Tepi Jalan. Jurnal Kebijakan Publik Vol. 3: 131-135.
- Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Subarsono. 2005. Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Winarno, Budi. 2012. Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus. Jakarta: PT Buku Seru.
- Peraturan Perundang-undangan:
- Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum
- Peraturan Walikota Semarang No.20 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan
- Sumber internet:
- Iqbal, Muhammad. 2007. Analisis Peran Pemangku Kepentingan dan Implementasinya dalam Pembangunan Pertanian. Dalam <http://www.google.co.id/analisis+stakeholder>. Diunduh pada 25 November 2014 pukul 21.37 WIB.
- Kariono. 2013. Paradigma Baru Pelayanan Publik. Dalam <http://bppt.sumutprov.go.id/media-bpptprovsu/news.html>. Diunduh pada 29 Mei 2014 pukul 21.00 WIB.
- Profil Kota Semarang Tahun 2012 dalam <http://www.bappeda-semarangkota.go.id>. Diunduh pada tanggal 25 Januari 2015 pukul 10.00 WIB.
- Lainnya:
- Laporan Triwulan IV Tahun 2014 Bidang Perparkiran Dishubkominfo Kota Semarang
-